

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pada topik politik pariwisata yang fokus dalam kajian relasi kuasa dalam pengembangan objek wisata tikako di Desa Kalilunjar Kabupaten Banjarnegara di era pandemi. Desa Kalilunjar yang memiliki geografis yang beragam memiliki pesona alam yang menjanjikan. Menyadari adanya potensi alam yang dapat dikelola menjadikan Pemerintah Desa Kalilunjar khususnya kepala desa memanfaatkan potensi yang telah ada. Dalam proses pengembangan objek wisata, terjadi relasi antar aktor yang mencerminkan relasi kuasa terkait latar belakang kepentingan yang dimilikinya. Terdapat empat kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian ini. *Pertama*, relasi kuasa dalam pengembangan Objek Wisata Tikako di Desa Kalilunjar Kabupaten Banjarnegara di era pandemi melibatkan kepala desa dan elemen masyarakat. Didapatkan kesimpulan bahwa kepala desa melakukan kerja sama dengan beberapa aktor lain namun ia mendominasi relasi kuasa. Hubungan relasi kuasa ini memiliki sifat asosiatif, di mana hubungan yang terbentuk mengarah pada tujuan yang positif. Hal tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya kepala desa memiliki sumber modal simbolik sebagai kepala pemerintahan desa yang mempunyai otoritas dalam mengelola sumber daya desa. Dengan jabatan yang dimilikinya dengan mudah ia dapat mengakomodir kepentingannya dengan mengarahkan masyarakat mewujudkan rancangan dan gagasannya. Selain itu, kepala desa Slamet Rahardjo juga memiliki sumber modal ekonomi. Dimana dalam kegiatan pengembangan

pariwisata dibutuhkan sumber dana yang kuat, Slamet Rahardjo secara mandiri menyokong adanya kebutuhan biaya pembangunan dan pengembangan objek. Namun akibat keterbatasan dana, pengembangan objek dilakukan secara bertahap dengan metode pemutaran pemasukan. Dengan demikian program pengembangan objek wisata tak bisa langsung memiliki perkembangan yang pesat.

Kedua, dalam proses pembangunan dan pengembangan objek wisata tidak dilakukan melalui keterlibatan antar aktor seperti kepala desa, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ngudi Mertani, KBPH Karangobar, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tuk Kumala, Pemerintah Desa Kalilunjar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, PKK Desa Kalilunjar dan masyarakat setempat. Para aktor yang terlibat mendukung jalannya pembangunan objek wisata yang dilatar belakangi oleh kepentingan masing-masing.

Ketiga, terdapat faktor kontekstual yang mendorong dan menghambat terjadinya relasi kuasa dalam pengembangan objek wisata tidak di Desa Kalilunjar Kabupaten Banjarnegara di era pandemi. Faktor kontekstual menjadi faktor bekerjanya relasi kuasa dan menjadi faktor penentu pengembangan objek wisata tidak. Potensi sumber daya alam menjadi salah satu pendorong berdirinya objek wisata tidak. Dimana awalnya tidak dibangun dan dimaksudkan untuk wisata kuliner, namun melihat alamnya menjadi daya tarik maka diwujudkan wisata alam berbasis kuliner. Gagasan pembangunan objek wisata ini juga didukung oleh kerjasama antara pihak-pihak terkait. Masyarakat diberdayakan dengan dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengelolaan. Tak hanya

melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengelola objek, kelompok PKK juga diberdayakan dengan penjualan produk UMKM. Dengan berbagai upaya dilakukan menunjukkan keseriusan kepala desa Slamet Rahardjo yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Adanya faktor pendorong juga tidak bisa lepas dari adanya faktor penghambat. Faktor penghambat relasi kuasa dalam pengembangan objek wisata tikako yakni keterbatasan dana. Meskipun Slamet Rahardjo memiliki modal simbolik sebagai kepala desa yang dipergunakan untuk mengakomodir masyarakat, namun sumber dana yang kuat juga diperlukan. Tidak adanya investor dalam pembangunan objek menjadikan pengembangan dilakukan secara bertahap karena dana didapatkan dari pendapatan tiket masuk kunjungan wisata. Oleh karena itu pengelolaan dan promosi terus dilakukan guna menarik investor yang akan menanamkan modalnya. Terlebih karena pengembangan objek wisata ini dilakukan di tengah pandemi menjadikan hubungan dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam hal pengurusan perijinan belum selesai. Kemudian, faktor penghambat lainnya yaitu adanya potensi bencana alam. Memiliki curah hujan yang tinggi dan berlokasi di bibir sungai, apabila terjadi hujan yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama dapat berpotensi adanya bencana tanah longsor.

Keempat, terdapat pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan pada relasi kuasa dalam pengembangan objek wisata tikako di Desa Kalilunjar Kabupaten Banjarnegara di era pandemi. Pihak yang diuntungkan adalah 1) Kepala Desa Kalilunjar; 2) masyarakat setempat yang menjadi pengelola objek dan pengusaha olahan salak; 3) Pemerintah Desa Kalilunjar. Kepala Desa

Kalilunjar mendapatkan keuntungan sebagai pemilik objek. Dengan adanya objek wisata masyarakat sekitar memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat yang mengelola objek sekaligus memiliki usaha di sekitar objek wisata. Tak hanya itu, Pemerintah Desa Kalilunjar juga memiliki citra yang positif karena terjadi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, di sisi lain Kepala Desa Kalilunjar dan masyarakat sekitar juga memiliki potensi kerugian. Hal ini dikarenakan letak objek wisata Tikako yang berlokasi di bibir sungai dapat mendatangkan kerugian apabila terjadi bencana tanah longsor.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan antara lain *pertama*, jika dilihat dari relasi kuasa yang terjadi antaraktor dalam pengembangan Objek Wisata Tikako maka terbentuk relasi yang bersifat *zero sum*. Relasi *zero sum* dalam penelitian ini menggambarkan situasi di mana seorang aktor yakni Kepala Desa Kalilunjar memiliki posisi diuntungkan dan dirugikan dalam keadaan yang lain. Keuntungan yang dimaksud adalah pendapatan materi dan citra individu, sedangkan kerugian yang dimaksud adalah adanya potensi bencana alam yang dapat menghancurkan objek wisata. *Kedua*, adanya Objek Wisata Tikako menjadi jembatan bangkitnya perekonomian sektor pariwisata dari masa pandemi. Hal ini dilakukan dengan melakukan promosi yang menarik sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan. *Ketiga*, keberhasilan sejak tahap gagasan hingga pengembangan tidak lepas dari figur Kepala Desa Kalilunjar yang kuat. Dengan memiliki sumber daya ekonomi hingga budaya, Kepala Desa Kalilunjar memiliki citra politik yang baik. *Keempat*, pembangunan Objek Wisata Tikako kurang memperhatikan daya dukung

lingkungan dalam pengembangan suatu kawasan wisata. Dalam konteks pembangunan Objek Wisata Tikako yang berlokasi di bibir sungai dan di bawah lahan yang tinggi memungkinkan adanya potensi bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor. Adanya pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan ini mampu menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan sehingga kemungkinan kerusakan dapat dihindari.

7.2 Saran

Proses pengembangan objek wisata tikako hingga saat ini masih terus dilakukan. Perluasan wilayah objek wisata serta penambahan sarana dan prasana menjadi upaya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa hal yang diusulkan sebagai saran agar pengembangan objek wisata tikako sesuai dengan tujuannya yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran desa. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Diperlukannya perijinan secara resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Banjarnegara melakukan promosi objek wisata baik lokal maupun antar daerah;
- 2) Menjalin hubungan kerjasama dan memperbaiki kordinasi dengan Pokdarwis Tuk Kumala sehingga tikako memiliki wadah untuk kegiatan kepariwisataan;
- 3) Menjalin kerjasama dengan investor maupun pihak pemodal untuk dikelola modalnya di Objek Wisata Tikako. Hal ini berguna untuk keberlangsungan dan

kelancaran pengembangan Objek Wisata Tikako terkait pengadaan sarana dan prasarana;

- 4) Melakukan peninjauan yang lebih mendalam pada daya dukung lingkungan. Hal ini menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan sehingga kemungkinan kerusakan dapat dihindari. Hal ini tentu akan mampu mempercepat perkembangan pariwisata dan mempermudah proses perijinan.

